

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia kini telah menerapkan otonomi daerah dengan tujuan demi terselenggaranya urusan pemerintah yang lebih efektif, efisien dan bertanggung jawab. Dimulainya penerapan otonomi daerah ditandai dengan adanya UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Saat ini UU yang berlaku telah diperbaiki dengan alasan adanya tuntutan tingkat efisiensi yang lebih tinggi, perubahan tersebut ditetapkan pada UU No 32 tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004. Dengan adanya perubahan UU tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengatur rumah tangga daerahnya masing masing. Pemberian kewenangan yang lebih luas ini menimbulkan dampak pada daerah yaitu daerah harus mempersiapkan aspek-aspek pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Aspek-aspek pendukung tersebut meliputi masalah keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Aspek keuangan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaannya, ditambah lagi kini daerah semakin dituntut untuk semakin mandiri dalam pembiayaan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan daerah. Sejalan dengan tuntutan tersebut pemerintah juga memberikan kewenangan pada setiap daerah untuk menggali potensi-potensi yang ada, supaya daerah tidak terus bergantung kepada pemerintah pusat.

Walaupun daerah dituntut untuk dapat melaksanakan kemandirian atas pembiayaan pemerintah daerahnya masing masing, pemerintah pusat masih tetap memiliki andil dalam pembiayaan pemerintah daerah yaitu dengan adanya dana perimbangan. Menurut Noordiawan dan Hertianti (2010:25) penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, mengacu pada Undang-Undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan pemerintah dan daerah. Adanya dana perimbangan tersebut bertujuan untuk mengurangi ketimpangan atas pendanaan pemerintah dan daerah. Tetapi sampai saat ini pemerintahan daerah masih memiliki ketergantungan yang cukup besar pada pemerintah pusat dalam hal pembiayaan. Selain mengenai dana yang diterima dan dikelola pemerintah daerah, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban menyajikan laporan keuangan sebagai salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik.

Menurut UU No 17 Tahun 2003, Laporan keuangan yang harus di susun oleh pemerintah daerah setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Sesuai dengan PP no 24 tahun 2005 keuangan haruslah relevan, handal dan dapat dipahami supaya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam prakteknya laporan keuangan daerah memiliki beberapa kendala yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas, selain itu adanya keterbatasan pemahaman akan keuangan daerah pada pemerintah daerah. Dengan adanya kendala yang

terdapat dalam penyusunan keuangan daerah maka perlu diadakannya penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan kinerja pemerintah daerahnya supaya dapat diketahui apakah pemerintah daerah tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik atau belum.

Menurut Widodo dalam Halim (2004) penilaian kinerja pemerintah daerah menggunakan analisis rasio laporan keuangan dengan menggunakan empat indikator (kemandirian, efektivitas, efisiensi dan aktivitas). Analisis laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan pada berbagai macam informasi yang terjadi dalam laporan keuangan (PPA-LPA FE UNDIP, 2007). Apabila analisis ini dapat berjalan dengan baik maka pemerintah pusat akan mempunyai gambaran dari kondisi pada setiap daerah yang ada di wilayah kekuasaannya. Analisis kinerja keuangan biasanya dilakukan pada perusahaan baik yang berorientasi laba maupun non-laba. Penggunaan analisis rasio laporan keuangan sebagai alat analisis keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik, khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Padahal dari analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Penelitian sebelumnya yang menggunakan rasio keuangan diteliti oleh Hendradyadi (2011) mengenai perbandingan indikator kinerja keuangan pemerintah kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan evaluasi kinerja keuangan

pemerintah daerah di Jawa Tengah, berdasarkan indikator kemandirian, efektifitas, dan aktifitas keuangan daerah pada 35 pemerintah kota atau kabupaten kemudian diuji perbedaan keduanya. Penelitian tersebut dilatarbelakangi semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pengelolaan sumber daya daerah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya. Oleh karena itu peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa tetapi peneliti menguji dengan objek penelitian yang berbeda yaitu pada kabupaten /kota yang ada di Pulau Kalimantan. Dipilihnya Pulau Kalimantan karena masih cukup besar tingkat ketergantungan dana perimbangan kabupaten/kota di Pulau Kalimantan yang tercermin pada provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Selain itu di daerah Kalimantan masih jarang dilakukan penelitian serupa dan peneliti tertarik karena pada beberapa tahun ini penerimaan dana perimbangan terbesar diluar Pulau Jawa menurut data dari direktorat jenderal perimbangan keuangan diterima oleh salah satu provinsi di Kalimantan, yang dimana perbandingannya sangatlah jauh dengan provinsi yang lain pada provinsi di Pulau Kalimantan.

Menurut UU No 34 Tahun 2004 dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Tetapi apabila dilihat dari besarnya dana yang diberikan pemerintah terhadap suatu daerah dimana dalam satu kawasan maka dapat menimbulkan kesenjangan yang cukup tinggi. Hal ini menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan daerah di kabupaten atau kota pada tahun 2008-2011, maka penulis memilih topik “ Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten atau Kota di Pulau Kalimantan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada indikator kinerja keuangan antar kabupaten/kota di Pulau Kalimantan?
2. Bagaimana peringkat kinerja untuk masing-masing daerah kabupaten/kota di Pulau Kalimantan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk menguji kembali penelitian sebelumnya mengenai perbandingan indikator kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Kalimantan.
2. Untuk mengetahui kabupaten/kota mana yang baik kinerjanya menurut masing-masing provinsi di Pulau Kalimantan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori
 - Melalui penelitian ini, peneliti ingin memberikan bukti empiris tentang perbandingan indikator kinerja keuangan pemerintah daerah.
 - Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya yang meneliti topik yang sama.

2. Kontribusi Praktek

Hasil akhir penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi setiap daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan berdasarkan indikator yang terbagi dalam empat aspek yaitu kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan aktivitas. Hal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini khususnya mengenai penjelasan definisi keuangan daerah, laporan keuangan daerah, sumber pendapatan daerah, belanja daerah, kinerja keuangan daerah, penilaian kinerja, dan rasio keuangan.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bentuk dan tempat penelitian, populasi, dan sampel, metode pengumpulan data, metode pengukuran data, teknik pengujian instrumen serta metode analisis data.

Bab IV : Analisa Data

Bab ini membahas mengenai analisa yang selanjutnya akan diinterpretasikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

